

Merdeka Belajar Dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan : *Suatu Alternatif Pembinaan Siswa Menjadi Warganegara Yang Sadar Hak dan Kewajibannya*

Kusnadi

PPKn, FKIP, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan

koes@ecampus.ut.ac.id

Abstract: This article aims to discuss how civic education has an important role in forming citizens who are aware of their rights and obligations in a democratic country. However, the conventional approach in delivering civics curriculum material is often less attractive to students and unable to provide sufficient space for them to develop their full potential. Therefore, Merdeka Learning is an attractive alternative for fostering students to become citizens who are aware of their rights and obligations. Independent Learning is an educational concept that gives freedom to students to manage their learning process, including determining the material they want to learn, the learning methods used, and assessing their learning progress. In the context of citizenship education, Merdeka Learning provides opportunities for students to choose topics that are relevant to the rights and obligations of citizens, such as human rights, political participation, social issues, and the history of the struggle for independence. The method used is a qualitative approach to the method of literature study. Literature study is the process of finding, analyzing, and analyzing sources of information that are relevant to a particular research topic or study. Through the Merdeka Learning approach in civics education, it is hoped that students can become more active, creative, and innovative in developing their understanding of rights and obligations as citizens. They will also learn to value differences, think critically, and participate actively in society. This research will further explore how Freedom Learning can be applied in the context of civics education and how it can influence the development of students to become citizens who are aware of their rights and obligations. It is hoped that the results of this research can contribute to the development of civics education that is more relevant and meaningful in facing the challenges of an increasingly complex global society.

Keywords: Freedom of Learning, Citizenship Education, Student Development, Rights and Obligations

Abstrak: Artikel ini bertujuan membahas tentang bagaimana pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membentuk warganegara yang sadar hak dan kewajibannya di negara yang demokratis. Namun, pendekatan konvensional dalam penyampaian materi kurikulum kewarganegaraan seringkali kurang menarik bagi siswa dan tidak mampu memberikan ruang yang cukup bagi mereka untuk mengembangkan potensi diri mereka secara maksimal. Oleh karena itu, Merdeka Belajar menjadi alternatif yang menarik dalam pembinaan siswa menjadi warganegara yang sadar hak dan kewajibannya. Merdeka Belajar adalah konsep pendidikan yang memberikan kebebasan pada siswa untuk mengatur proses belajar mereka sendiri, termasuk dalam menentukan materi yang ingin dipelajari, metode pembelajaran yang digunakan, serta penilaian atas kemajuan belajar mereka. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, Merdeka Belajar memberikan kesempatan bagi siswa untuk memilih topik yang relevan dengan hak dan kewajiban warganegara, seperti hak asasi manusia, partisipasi politik, isu-isu sosial, dan sejarah perjuangan kemerdekaan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Studi literatur adalah proses mencari, menelaah, dan menganalisis sumber-sumber informasi yang relevan dengan topik penelitian atau studi tertentu. Melalui pendekatan Merdeka

Belajar dalam pendidikan kewarganegaraan, diharapkan siswa dapat menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam mengembangkan pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban sebagai warganegara. Mereka juga akan belajar untuk menghargai perbedaan, berpikir kritis, dan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Penelitian ini akan mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana Merdeka Belajar dapat diterapkan dalam konteks pendidikan kewarganegaraan dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi pembinaan siswa menjadi warganegara yang sadar hak dan kewajibannya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan yang lebih relevan dan bermakna dalam menghadapi tantangan masyarakat global yang semakin kompleks.

Kata kunci: Merdeka Belajar, Pendidikan Kewarganegaraan, Pembinaan Siswa, Hak dan Kewajiban

Diterima: 5 Oktober 2023

Disetujui: 7 November 2023

Dipublikasi: 29 Desember 2023



© 2023 FKIP Universitas Terbuka
This is an open access under the CC-BY license

PENDAHULUAN

"Merdeka Belajar" dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan memberikan kebebasan dan kemandirian kepada siswa dalam mengatur proses pembelajaran mereka. Konsep "Merdeka Belajar" menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran, di mana mereka memiliki kebebasan untuk memilih apa yang ingin dipelajari, bagaimana ingin belajar, dan bagaimana hasil belajar mereka akan dievaluasi. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran penting di dalam kurikulum pendidikan di Indonesia (Yamin & Syahrir, 2020). Tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran dan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warganegara yang baik dan bertanggung jawab. Namun, dalam praktiknya, proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan seringkali kurang menarik dan kurang berdampak signifikan bagi para siswa. Siswa seringkali merasa kurang tertarik dan tidak termotivasi untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai kewarganegaraan yang seharusnya menjadi bagian dari identitas mereka sebagai warga negara Indonesia (Dayanti et al., 2020; Jufriadi, Huda, Aji, Pratiwi, & Ayu, 2022).

Di sinilah konsep "Merdeka Belajar" dalam Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi alternatif pembinaan siswa menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Dengan memberikan kebebasan pada siswa untuk memilih topik atau isu kewarganegaraan yang menarik bagi mereka, mereka akan lebih termotivasi dan bersemangat dalam mempelajari materi-materi yang relevan dengan kehidupan mereka. Selain itu, pendekatan "Merdeka Belajar" juga memungkinkan siswa untuk lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran, baik dalam mengidentifikasi masalah sosial yang ada di sekitar mereka, berdiskusi, atau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kewarganegaraan. Dengan cara ini, siswa dapat mengalami secara langsung bagaimana

hak dan kewajiban sebagai warga negara dapat berdampak pada kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, konsep "Merdeka Belajar" juga mendorong guru untuk menjadi fasilitator yang mendukung dan membimbing siswa dalam proses pembelajaran, bukan hanya sebagai pemberi informasi. Dengan demikian, siswa dapat mengembangkan keterampilan kritis dan analitis yang penting dalam memahami isu-isu kewarganegaraan. Secara keseluruhan, penerapan konsep "Merdeka Belajar" dalam Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi alternatif yang efektif untuk membina siswa menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Melalui pendekatan ini, diharapkan siswa dapat lebih terlibat, termotivasi, dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang arti menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab di Indonesia.

Konsep "Merdeka Belajar" dalam Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu pendekatan yang mengutamakan pemberdayaan siswa dalam mengelola dan mengatur proses belajar mengajar secara mandiri. Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan, penerapan konsep ini dapat menjadi alternatif yang efektif untuk membina siswa menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Beberapa alasan mengapa penerapan "Merdeka Belajar" dapat berdampak positif dalam membina siswa menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya adalah sebagai berikut: (Dayanti et al., 2020; Yamin & Syahrir, 2020)

Pemberdayaan siswa, konsep "merdeka belajar" memberikan kebebasan bagi siswa untuk menentukan cara belajar yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan kebutuhan mereka. Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan, hal ini memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi beragam isu dan topik terkait kewarganegaraan yang menarik minat mereka. Ketika siswa merasa memiliki kendali atas proses belajar mereka, mereka cenderung lebih bersemangat untuk belajar dan terlibat secara aktif dalam pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Motivasi intrinsik, dengan memberikan kebebasan dalam memilih materi pembelajaran dan metode yang sesuai, siswa dapat merasa lebih termotivasi karena mereka dapat menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari dan minat mereka sendiri. Pembelajaran yang relevan dan bermakna akan membantu siswa untuk lebih memahami arti menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Pembelajaran berpusat pada siswa, pendekatan "merdeka belajar" menggeser peran guru dari pusat pembelajaran ke fasilitator dan pemandu. Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan, guru dapat membantu siswa untuk menjalankan diskusi, berdebat, melakukan penelitian, dan mengembangkan pemahaman tentang nilai-nilai kewarganegaraan yang penting bagi mereka dan masyarakat Indonesia. Pengalaman nyata, dalam "merdeka belajar", ada potensi untuk melibatkan siswa dalam proyek-proyek nyata di masyarakat yang terkait dengan kewarganegaraan. Misalnya, melalui kegiatan pelayanan masyarakat, partisipasi dalam diskusi publik, atau mengikuti simulasi pemilihan umum. Melalui pengalaman langsung ini, siswa dapat menginternalisasi nilai-nilai demokrasi, toleransi, tanggung jawab, dan partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman mendalam, dengan menerapkan pendekatan "merdeka belajar", diharapkan siswa akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang arti menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Pemahaman ini tidak hanya berdasarkan fakta-fakta dan informasi yang dipahami secara pasif, tetapi juga melibatkan proses kritis dan reflektif dalam menghubungkan pembelajaran dengan realitas sosial dan politik Indonesia. Namun, penting untuk diingat bahwa penerapan

konsep "Merdeka Belajar" dalam Pendidikan Kewarganegaraan memerlukan dukungan dan kesiapan dari seluruh sistem pendidikan. Sumber daya yang memadai, pelatihan bagi guru, dan dukungan dari pihak sekolah dan pemerintah sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Selain itu, perlu juga diakui bahwa pendekatan ini mungkin tidak sesuai dengan semua konteks dan tingkat pendidikan, dan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing sekolah dan siswa. Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul pertanyaan mengenai merdeka belajar dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, suatu alternatif pembinaan siswa menjadi warganegara yang sadar hak dan kewajibannya.

METODE

Studi literatur adalah langkah kunci dalam penulisan artikel ilmiah yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis pengetahuan yang telah ada tentang topik tertentu. Metode studi literatur melibatkan pencarian, analisis, dan penyajian informasi dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, artikel, dan sumber-sumber lainnya. Berikut adalah uraian tentang metode studi literatur dalam penulisan artikel: Dalam proses penulisan artikel ilmiah, studi literatur merupakan fondasi yang kuat. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kerentanan dalam pengetahuan yang sudah ada dan menemukan celah penelitian yang perlu diisi. Prosesnya dimulai dengan pencarian berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber ini dapat ditemukan melalui perpustakaan, basis data akademik, atau pencarian daring. Setelah mengumpulkan sumber-sumber tersebut, peneliti perlu melakukan evaluasi kritis terhadap setiap sumber. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap kualitas metodologi penelitian, relevansi, dan keakuratan informasi yang disajikan dalam sumber-sumber tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hanya informasi yang berkualitas tinggi dan relevan yang akan digunakan dalam artikel. Selanjutnya, peneliti akan menyintesis informasi dari sumber-sumber yang telah dievaluasi. Ini melibatkan pengorganisasian informasi menjadi kerangka kerja yang koheren dan logis. Peneliti juga dapat mengidentifikasi tren, perbedaan pendapat, atau kesenjangan dalam pengetahuan yang ada.

Penting untuk mencatat bahwa studi literatur bukan hanya sekadar pengumpulan informasi yang tidak terstruktur. Sebaliknya, itu adalah proses yang sangat terarah yang memerlukan analisis yang cermat dan pemahaman mendalam tentang topik penelitian. Hasil dari metode studi literatur akan membantu penulis dalam merumuskan kerangka teoritis untuk artikel mereka, membangun argumen yang kuat, dan mengidentifikasi kontribusi unik dari penelitian mereka terhadap pengetahuan yang sudah ada. Dalam akhirnya, metode studi literatur merupakan langkah penting dalam penelitian ilmiah yang membantu peneliti memahami konteks penelitian mereka, mengidentifikasi celah pengetahuan, dan merumuskan dasar teoritis yang kuat untuk artikel mereka. Dengan melakukan studi literatur yang cermat dan komprehensif, peneliti dapat memastikan bahwa penelitian mereka memenuhi standar akademik yang tinggi dan memberikan kontribusi berarti dalam disiplin ilmu mereka (Grant & Booth, 2009; Sugiyono, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Merdeka Belajar Suatu Harapan

Merdeka Belajar adalah suatu konsep pendidikan yang mendasarkan diri pada prinsip kemerdekaan, fleksibilitas, dan otonomi dalam pembelajaran. Konsep ini merupakan suatu harapan bagi dunia pendidikan yang ingin menghadirkan perubahan yang positif dalam proses belajar-mengajar. Merdeka Belajar menggambarkan visi pendidikan yang membebaskan siswa dari keterbatasan kurikulum yang kaku dan mengizinkan mereka untuk memahami, mengejar, dan mengembangkan minat serta bakat mereka dengan lebih bebas. Pada dasarnya, Merdeka Belajar mempromosikan pemikiran kritis, kreativitas, dan inovasi dalam pendidikan. Ini menekankan bahwa siswa tidak hanya perlu menghafal fakta-fakta, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk memahami konteks yang lebih luas, menganalisis informasi, dan menciptakan solusi untuk masalah yang kompleks. Merdeka Belajar menghargai peran guru sebagai fasilitator pembelajaran yang membimbing siswa dalam eksplorasi pengetahuan. Selain itu, konsep Merdeka Belajar juga mengakui pentingnya pembelajaran sepanjang hayat. Ini berarti bahwa pendidikan tidak berhenti setelah lulus sekolah atau universitas, tetapi harus terus berlanjut sepanjang kehidupan. Siswa diharapkan untuk menjadi pembelajar mandiri yang terus mencari pengetahuan dan meningkatkan keterampilan mereka sepanjang hidup mereka. Merdeka Belajar bukan hanya tentang proses belajar, tetapi juga tentang pengembangan karakter. Ini mencakup aspek-aspek seperti kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan empati. Dalam konteks Merdeka Belajar, siswa diajak untuk menjadi individu yang memiliki nilai-nilai positif dan mampu berkontribusi pada masyarakat dengan berbagai cara. Pentingnya Merdeka Belajar juga tercermin dalam upaya untuk mengurangi kesenjangan pendidikan. Konsep ini berusaha memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi mereka, memiliki akses yang sama ke peluang pendidikan yang berkualitas. Ini adalah salah satu harapan terbesar dari Merdeka Belajar, yaitu mengubah pendidikan menjadi alat yang benar-benar inklusif dan demokratis. Dengan demikian, Merdeka Belajar adalah suatu harapan yang kuat untuk merombak sistem pendidikan yang ada dan menghadirkan pendidikan yang lebih relevan, bermakna, dan memberdayakan bagi semua individu. Ini adalah pemikiran yang terus berkembang dalam dunia pendidikan dan menjadi landasan bagi perubahan positif dalam upaya menciptakan generasi masa depan yang lebih kompeten, berdaya saing, dan memiliki nilai-nilai yang kuat.

“Merdeka Belajar Suatu Harapan” mencerminkan komitmen Indonesia untuk memperbaiki sistem pendidikan dan memberdayakan generasi mudanya menjadi pribadi yang utuh dan mampu berkontribusi bagi kemajuan bangsa. “Merdeka Belajar” adalah inisiatif pendidikan dari Indonesia yang diperkenalkan untuk mempromosikan dan menumbuhkan budaya belajar mandiri dan sepanjang hayat. Istilah “Merdeka Belajar” diterjemahkan menjadi “Freedom to Learn” dalam bahasa Inggris. Diluncurkan pada September 2020 sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk mereformasi sistem pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran di tanah air (Deni Sopiansyah¹, Siti Masruroh², Qiqi Yuliati Zaqiah³, 2022).

Tujuan Merdeka Belajar adalah untuk mengembangkan sistem pendidikan yang lebih inklusif, relevan, dan dinamis yang mempersiapkan siswa Indonesia menghadapi tantangan abad ke-21. Dengan mendorong pembelajaran seumur hidup dan memberikan siswa kebebasan untuk mengejar minat dan hasrat mereka, pemerintah bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil dan mudah beradaptasi serta

mempromosikan pembangunan masyarakat secara keseluruhan (Deni Sopiansyah¹, Siti Masruroh, Qiqi Yuliati Zaqiah, 2022; Jufriadi et al., 2022).

Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar Dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan

Pertukaran Pelajar adalah istilah yang mengacu pada program pertukaran pelajar yang dilaksanakan dalam kerangka inisiatif "Merdeka Belajar" di Indonesia. Inisiatif "Merdeka Belajar" adalah suatu konsep yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (sekarang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Inovasi) Republik Indonesia. Tujuan utama dari "Merdeka Belajar" adalah untuk mendorong pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel, inklusif, dan berfokus pada pengembangan kompetensi serta potensi individu. Namun, perlu diingat bahwa program pertukaran pelajar juga harus memperhatikan aspek-aspek seperti keselamatan siswa, keberlanjutan program, pengakuan kredit akademik, dan kesetaraan akses bagi semua siswa yang berminat. Kesuksesan program pertukaran pelajar "Merdeka Belajar" dalam konteks pendidikan kewarganegaraan akan tergantung pada bagaimana program ini diimplementasikan, dinilai, dan dikelola secara efektif.

Kegiatan kedua adalah magang Praktek Kerja Merdeka Belajar adalah program yang memadukan aspek belajar dan pengalaman lapangan dalam suatu konteks kerja atau industri tertentu. Program ini dirancang untuk memberikan pengalaman praktis kepada pelajar dalam lingkungan kerja nyata, yang mana juga memiliki dampak positif pada pembentukan karakter, keterampilan, dan pemahaman mereka tentang peran sebagai warga negara yang aktif. Dalam merancang program magang praktek kerja merdeka belajar dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, penting untuk memastikan bahwa pengalaman magang tersebut terintegrasi dengan konsep-konsep kewarganegaraan yang diajarkan di dalam kelas. Evaluasi dan refleksi juga harus menjadi bagian penting dari program ini, sehingga pelajar dapat menghubungkan pengalaman mereka dengan konsep-konsep kewarganegaraan dan memahami dampaknya pada peran mereka sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Kegiatan ketiga asisten Mengajar Merdeka Belajar adalah sebuah inisiatif dalam konteks pendidikan di Indonesia yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (sekarang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi). Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif para mahasiswa yang ingin menjadi asisten pengajar dalam proses pembelajaran di sekolah-sekolah atau institusi pendidikan lainnya. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, inisiatif "Asisten Mengajar Merdeka Belajar" dapat memiliki beberapa implikasi positif. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman dan kesadaran warga negara tentang hak, kewajiban, nilai-nilai demokrasi, partisipasi politik, serta tanggung jawab sosial. Dengan demikian, inisiatif "Asisten Mengajar Merdeka Belajar" dapat menjadi sarana yang efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa tentang pentingnya peran aktif sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif dalam masyarakat dan negara.

Kegiatan keempat Penelitian atau riset "Merdeka Belajar" dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan merujuk pada upaya untuk mengkaji dan menganalisis konsep "Merdeka Belajar" dalam hubungannya dengan mata pelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan di Indonesia. "Merdeka Belajar" merupakan konsep yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (sebelumnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) Indonesia untuk memperluas dan memperbarui pendekatan dalam pembelajaran. Penelitian ini dapat dilakukan melalui metode penelitian kualitatif maupun kuantitatif, seperti studi literatur, wawancara dengan guru dan siswa, observasi di kelas, survei, dan analisis konten materi pembelajaran. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan kurikulum, strategi pengajaran, dan evaluasi dalam bidang Pendidikan Kewarganegaraan, dengan tujuan untuk menciptakan generasi yang paham akan hak, kewajiban, dan peran mereka sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Kegiatan kelima adalah proyek kemanusiaan Merdeka Belajar dalam konteks pendidikan kewarganegaraan mengacu pada upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan dan pemahaman tentang tanggung jawab sosial ke dalam proses pembelajaran. Ini adalah bagian dari inisiatif Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, Proyek Kemanusiaan Merdeka Belajar bertujuan untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademis, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya kemanusiaan, solidaritas sosial, toleransi, dan partisipasi aktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Melalui Proyek Kemanusiaan Merdeka Belajar, diharapkan bahwa siswa akan tumbuh menjadi individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial, serta memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik dan adil.

Kegiatan keenam adalah wirausaha merdeka mengacu pada konsep kewirausahaan yang diterapkan dalam konteks kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah bagian dari kurikulum di banyak negara yang bertujuan untuk membentuk pemahaman dan partisipasi aktif warga negara dalam masyarakat dan pemerintahan mereka. Penting untuk merancang pendekatan pembelajaran yang terintegrasi dengan baik, menggabungkan aspek-aspek kewirausahaan dengan tujuan-tujuan pendidikan kewarganegaraan. Dengan demikian, siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana mereka dapat berkontribusi pada masyarakat melalui kewirausahaan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada solusi.

Kegiatan ketujuh studi/proyek Independen Merdeka Belajar" dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) mengacu pada upaya siswa untuk mengambil inisiatif dalam mempelajari topik-topik yang mereka minati di luar kurikulum formal. Konsep "Merdeka Belajar" sendiri adalah pendekatan pendidikan yang memberi kebebasan kepada siswa untuk memilih metode dan materi pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Penting untuk mencatat bahwa Studi/Proyek Independen Merdeka Belajar dalam konteks PKN tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan siswa, tetapi juga pada pengembangan keterampilan kritis, pemecahan masalah, komunikasi, dan kepemimpinan yang relevan dengan kewarganegaraan yang bertanggung jawab.

Kegiatan kedelapan adalah Kuliah Kerja Nyata (KKN) Merdeka adalah program yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (sekarang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)

Indonesia pada tahun 2020. Tujuan utama dari program KKN Merdeka adalah untuk mengintegrasikan pengabdian masyarakat dan pembelajaran mahasiswa perguruan tinggi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Dayanti et al., 2020; Yamin & Syahrir, 2020). Dengan demikian, program KKN Merdeka dalam konteks pendidikan kewarganegaraan memberikan peluang berharga bagi mahasiswa untuk mengembangkan pemahaman tentang peran mereka sebagai warga negara yang aktif dan berkontribusi dalam masyarakat. Melalui pengalaman langsung di lapangan, mahasiswa dapat merasakan dampak nyata dari tindakan mereka dan mengembangkan sikap kewarganegaraan yang tangguh.

Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan (disingkat PKN) adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan di berbagai tingkat pendidikan di Indonesia. Tujuan utama dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membentuk dan mengembangkan kesadaran serta identitas sebagai warga negara yang baik, aktif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Murdiono, 2017; Suparlan Al Hakim dkk, 2014).

Materi Pendidikan Kewarganegaraan dapat berbeda pada setiap jenjang pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat menengah atas. Tujuannya adalah untuk menciptakan generasi yang memiliki rasa cinta tanah air, menghargai keragaman budaya, dan dapat berkontribusi positif dalam membangun bangsa dan negara Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian penting dalam menciptakan masyarakat yang sadar hukum, menghormati hak-hak asasi manusia, memiliki sikap demokratis, dan berperan aktif dalam pembangunan bangsa.

Dengan mengintegrasikan Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum pendidikan, diharapkan bahwa setiap siswa dapat tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, sadar akan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta mampu berperan aktif dalam proses pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia.

Konsep Warga Negara Yang Baik

Konsep warga negara yang baik merupakan suatu pandangan tentang tanggung jawab dan peran yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam suatu negara. Seorang warga negara yang baik adalah seseorang yang patuh terhadap hukum, menghormati hak-hak dan kebebasan individu lain, serta memiliki kesadaran akan tugas sosialnya. Mereka berkontribusi aktif dalam pembangunan masyarakat dan negara, baik melalui partisipasi politik maupun kegiatan sosial. Warga negara yang baik juga memiliki rasa keadilan, empati, dan toleransi terhadap perbedaan budaya, agama, dan pandangan politik (Assidiqi, 2015; Hamid, Indonesia, & Abdillah, 2018). Mereka menunjukkan sikap integritas, transparansi, dan tidak terlibat dalam praktik korupsi atau tindakan ilegal. Selain itu, warga negara yang baik memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban mereka dalam konteks negara hukum. Mereka juga mendukung prinsip-prinsip demokrasi, seperti kebebasan berbicara, berpendapat, dan memilih pemimpin secara adil. Sebagai warga negara yang baik, mereka menjaga lingkungan, peduli terhadap isu-isu sosial, dan berusaha memajukan kesejahteraan bersama. Dengan begitu, konsep warga negara yang baik menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan berkelanjutan (Kurniawan, 2015).

Perlu dicatat bahwa konsep warga negara yang baik dapat bervariasi di antara para tokoh ini, tetapi umumnya mencakup aspek-aspek seperti partisipasi aktif dalam kehidupan politik, pelayanan kepada masyarakat, moralitas, kesetaraan, dan perjuangan melawan ketidakadilan. Konsep warga negara yang baik mencakup serangkaian sikap, nilai, dan tindakan yang menjadi dasar bagi individu untuk berkontribusi secara positif pada masyarakat dan negara tempat mereka tinggal. Berikut adalah beberapa ciri dan karakteristik dari warga negara yang baik: (Chotimah, 2012; Jufriadi et al., 2022)

1. Kepatuhan pada hukum: Warga negara yang baik patuh pada hukum dan peraturan yang berlaku di negara mereka. Mereka menghormati hukum sebagai pijakan bagi keadilan, ketertiban, dan perlindungan bagi seluruh warga.
2. Bertanggung jawab: Warga negara yang baik mengakui tanggung jawab pribadi mereka terhadap tindakan dan keputusan yang mereka ambil. Mereka memahami bahwa keputusan individu dapat mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan.
3. Menghormati hak asasi manusia: Warga negara yang baik menghargai hak asasi manusia dan mengakui bahwa setiap orang memiliki nilai yang sama di mata hukum dan masyarakat.
4. Toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan: Warga negara yang baik menghargai keragaman budaya, agama, dan pandangan politik. Mereka berupaya memahami perspektif orang lain dan mencari cara untuk hidup secara damai dengan semua kelompok masyarakat.
5. Keterlibatan dalam proses demokrasi: Warga negara yang baik aktif dalam proses politik dan demokrasi, seperti berpartisipasi dalam pemilihan umum, menyuarakan pendapat mereka, dan mendukung keputusan yang diambil oleh pemerintahan yang sah.
6. Mempertahankan integritas: Warga negara yang baik berprinsip dan memiliki integritas tinggi. Mereka tidak terlibat dalam tindakan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.
7. Kepedulian sosial: Warga negara yang baik merasa bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Mereka berkontribusi pada upaya sosial, mengadopsi kepedulian terhadap orang yang kurang beruntung, dan berusaha untuk menciptakan dampak positif bagi komunitas mereka.
8. Kepedulian terhadap lingkungan: Warga negara yang baik sadar akan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Mereka berusaha untuk hidup secara berkelanjutan dan mendukung upaya pelestarian alam.
9. Pendidikan dan kesadaran politik: Warga negara yang baik berusaha meningkatkan pemahaman mereka tentang masalah politik dan sosial yang relevan. Mereka berusaha untuk menjadi warga yang terdidik dan berpikiran terbuka.
10. Keterlibatan dalam kegiatan komunitas: Warga negara yang baik aktif dalam kegiatan komunitas. Mereka berkontribusi pada kehidupan masyarakat dan mendukung upaya lokal yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup bersama.

Pembinaan Siswa Dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan (PKN)

Pembinaan siswa dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kesadaran kewarganegaraan siswa. PKN merupakan bagian dari kurikulum di banyak negara, termasuk Indonesia, yang bertujuan

untuk membekali siswa dengan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang berkaitan dengan negara, pemerintahan, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta nilai-nilai demokrasi dan kebhinekaan (Edi Rohendi, 2018; Firmansah, 2017).

Penting untuk memastikan bahwa pembinaan siswa dalam konteks PKN dilakukan secara kontekstual, relevan, dan dapat memotivasi siswa untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan aktif dalam pembangunan masyarakat dan negara. Guru dan tenaga pendidik memainkan peran sentral dalam memfasilitasi pembelajaran yang interaktif dan mendalam dalam rangka mencapai tujuan-tujuan PKN. Berikut penjelasannya: (Dayanti et al., 2020)

Hak dan Kewajiban Dalam Konsep Merdeka Belajar

Hak dan kewajiban adalah konsep hukum yang mendasari hubungan antara individu dan masyarakat, atau antara individu dengan pemerintah. Dalam konteks hukum, hak adalah hak istimewa atau kebebasan yang diberikan atau diakui kepada individu, sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab atau tugas yang harus dipenuhi oleh individu. Hak-hak memberikan individu kebebasan untuk melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu tanpa campur tangan dari pihak lain atau pemerintah. Contoh hak-hak yang umumnya diakui dalam banyak sistem hukum di dunia termasuk hak atas kebebasan berbicara, hak atas kebebasan beragama, hak atas privasi, hak atas pendidikan, dan hak atas persamaan perlakuan (Camelia & Suryandari, 2021; Totok, 2017).

Sementara itu, kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh individu untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Kewajiban-kewajiban ini sering kali ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan, dan meliputi kewajiban untuk mematuhi hukum, membayar pajak, menghormati hak-hak orang lain, dan berperan aktif dalam masyarakat. Penting untuk diingat bahwa hak dan kewajiban biasanya seimbang dan saling terkait. Hak individu harus dijalankan dengan bertanggung jawab dan tidak boleh mengorbankan hak atau kewajiban orang lain. Misalnya, hak atas kebebasan berbicara tidak berarti seseorang bisa secara bebas menyebarkan informasi palsu yang merugikan orang lain, karena itu akan melanggar kewajiban untuk tidak menyebarkan informasi yang menyesatkan atau mencemarkan nama baik. Pemerintah dan sistem hukum bertanggung jawab untuk menetapkan batas-batas dan regulasi yang adil untuk melindungi hak individu dan memastikan kewajiban dipenuhi. Konsep hak dan kewajiban ini menjadi landasan dalam membangun masyarakat yang beradab, demokratis, dan berkeadilan (Totok, 2017).

Dalam konteks "merdeka belajar" di Indonesia, terdapat hak dan kewajiban yang perlu dipahami dan dipegang oleh siswa dan pihak-pihak terkait. "Merdeka belajar" adalah konsep pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada siswa dalam menentukan pilihan pendidikan yang sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan mereka. Di bawah ini adalah penjelasan mengenai hak dan kewajiban dalam konteks merdeka belajar: (Winataputra, 2014)

Hak dalam Merdeka Belajar:

1. Kebebasan memilih mata pelajaran: Siswa memiliki hak untuk memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan potensi mereka, selama mematuhi aturan dan kurikulum yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan.

2. Menentukan jalur pendidikan: Siswa berhak menentukan jalur pendidikan yang ingin diikuti, baik itu pendidikan formal, non-formal, maupun informal, seperti melalui pendidikan vokasi, kejuruan, atau perguruan tinggi.
3. Mendapatkan dukungan pembelajaran: Siswa berhak mendapatkan dukungan dan fasilitas dari lembaga pendidikan untuk memaksimalkan potensi belajar mereka.
4. Akses informasi pendidikan: Siswa berhak mendapatkan akses informasi yang memadai tentang berbagai program pendidikan dan peluang karir yang tersedia.
5. Pendidikan yang inklusif: Setiap siswa berhak mendapatkan pendidikan yang inklusif tanpa diskriminasi, memperhatikan kebutuhan dan potensi masing-masing individu.

Kewajiban dalam Merdeka Belajar:

1. Menghormati peraturan dan norma: Siswa memiliki kewajiban untuk menghormati peraturan dan norma yang berlaku di lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan.
2. Menghargai hak orang lain: Siswa harus menghargai hak-hak orang lain, termasuk hak untuk belajar dan berkembang.
3. Bertanggung jawab atas pilihan belajar: Dalam merdeka belajar, siswa memiliki tanggung jawab untuk membuat pilihan belajar yang bijaksana dan sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai pribadi mereka.
4. Aktif dalam pembelajaran: Siswa diharapkan menjadi aktif dalam proses pembelajaran, mencari informasi, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar.
5. Mengejar keunggulan: Siswa memiliki kewajiban untuk berusaha mencapai prestasi belajar dan akademis yang maksimal, dengan tetap berpegang pada semangat merdeka belajar.

Penting untuk diingat bahwa merdeka belajar bukan berarti siswa bebas tanpa arahan atau bimbingan. Peran guru, orang tua, dan pihak-pihak terkait lainnya tetap penting dalam memberikan dukungan, bimbingan, dan arahan agar siswa dapat meraih potensi belajar mereka secara optimal.

Merdeka Belajar Dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan : Suatu Alternatif Pembinaan Siswa Menjadi Warganegara Yang Sadar Hak dan Kewajibannya

Merdeka Belajar adalah sebuah konsep dan kebijakan pendidikan di Indonesia yang bertujuan untuk memberdayakan siswa untuk memiliki proses belajar mereka dan untuk mendorong pendekatan pendidikan yang lebih mandiri dan mandiri. Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan, Merdeka Belajar menawarkan pendekatan alternatif untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya (Baro'ah, 2020; Susanty, 2020).

Merdeka Belajar adalah kebijakan pendidikan yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan mengubah sistem pendidikan menjadi lebih fleksibel, berpusat pada siswa, dan fokus pada pengembangan karakter. Kebijakan tersebut menekankan pemberdayaan siswa untuk mengambil peran lebih aktif dalam proses pembelajaran mereka, memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi minat mereka, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah mereka. Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan, Merdeka Belajar menawarkan beberapa manfaat dan peluang untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara

yang sadar dan bertanggung jawab. Berikut adalah beberapa poin penting untuk dipertimbangkan:

Pengembangan karakter, merdeka belajar mendorong para pendidik untuk fokus pada pendidikan karakter, termasuk menanamkan nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, rasa hormat, dan cinta tanah air. Nilai-nilai ini sangat penting dalam membangun warga negara yang sadar akan hak dan tanggung jawab mereka dalam masyarakat. Berpikir kritis dan kesadaran kewarganegaraan, dengan mengedepankan lingkungan belajar yang aktif dan berpusat pada siswa, Merdeka Belajar menumbuhkan pemikiran kritis dan mendorong siswa untuk bertanya, menganalisis, dan mendiskusikan masalah sosial dan kemasyarakatan. Proses ini membantu mereka menjadi lebih sadar akan peran mereka sebagai warga negara dan dampak tindakan mereka terhadap masyarakat. Hak dan kewajiban kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan di bawah Merdeka Belajar dapat fokus pada mendidik siswa tentang hak dan kewajiban kewarganegaraan mereka sesuai dengan konstitusi Indonesia. Ini termasuk memahami prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi dalam kegiatan sipil, dan menyadari peran mereka dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan Masyarakat, Merdeka Belajar memungkinkan siswa untuk terlibat dalam pengalaman belajar melalui keterlibatan masyarakat dan kegiatan sosial. Dengan berpartisipasi aktif dalam proyek komunitas dan memahami kebutuhan masyarakat setempat, siswa dapat mengembangkan rasa empati dan tanggung jawab sebagai warga negara.

Keragaman dan Toleransi, Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks Merdeka Belajar dapat menekankan pentingnya keragaman, toleransi, dan pluralisme dalam membangun masyarakat yang harmonis. Hal ini dapat membantu siswa menghargai dan menghormati latar belakang budaya, agama, dan sudut pandang yang berbeda. Isu Lingkungan dan Sosial: Pendidikan Kewarganegaraan juga dapat berfokus pada kesadaran lingkungan dan praktik berkelanjutan. Dengan memasukkan topik-topik ini ke dalam kurikulum, siswa dapat belajar menjadi warga negara yang bertanggung jawab yang sadar akan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.

Otonomi Mahasiswa: Merdeka Belajar mendorong mahasiswa untuk mengeksplorasi minat dan kegemaran mereka, yang dapat meluas ke isu-isu kemasyarakatan dan sosial yang mereka minati. Memberi siswa otonomi dan pilihan dalam perjalanan belajar mereka dapat menghasilkan warga negara yang lebih terlibat dan termotivasi. Teknologi dan Keterlibatan Masyarakat: Di bawah Merdeka Belajar, teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendorong keterlibatan masyarakat. Siswa dapat menggunakan platform digital untuk berdiskusi, berbagi ide, dan berkolaborasi dalam prakarsa kemasyarakatan, menumbuhkan rasa kewarganegaraan yang aktif di era digital. Merdeka Belajar dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan menawarkan alternatif yang menjanjikan untuk membentuk siswa menjadi warga negara yang sadar dan bertanggung jawab. Dengan berfokus pada pengembangan karakter, pemikiran kritis, keterlibatan sipil, dan kesadaran sosial, pendekatan pendidikan ini dapat berkontribusi pada pengembangan individu yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademis tetapi juga terlibat aktif dalam membentuk masyarakat yang lebih baik.

Namun, penting untuk mengetahui potensi tantangan dan keterbatasan dalam pelaksanaan Merdeka Belajar dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan:

Disparitas Sumber Daya: Merdeka Belajar mungkin memerlukan sumber daya yang signifikan, seperti akses ke teknologi, pendidik yang berkualitas, dan materi

pembelajaran. Memastikan bahwa semua sekolah dan siswa memiliki akses yang sama ke sumber daya ini dapat menjadi suatu tantangan, terutama di daerah yang kurang berkembang. Bimbingan dan Dukungan: Sementara mempromosikan otonomi sangat berharga, siswa mungkin masih membutuhkan bimbingan dan dukungan, terutama dalam mata pelajaran yang kompleks seperti pendidikan kewarganegaraan. Pelatihan yang memadai bagi para pendidik untuk memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada siswa dan untuk menangani isu-isu kewarganegaraan yang sensitif sangatlah penting. Faktor Sosial dan Budaya: Beberapa topik dalam pendidikan kewarganegaraan mungkin sensitif atau kontroversial dalam konteks budaya atau masyarakat tertentu. Menyeimbangkan eksplorasi sudut pandang yang beragam sambil menghormati norma dan nilai budaya dapat menjadi tantangan. Penilaian dan Akuntabilitas: Menyeimbangkan otonomi siswa dengan kebutuhan penilaian standar dan langkah-langkah akuntabilitas dapat menjadi kompleks. Sangat penting untuk menemukan cara untuk mengevaluasi pengetahuan dan keterlibatan siswa tanpa membatasi kebebasan mereka untuk belajar. Merdeka Belajar berpotensi menjadi alat yang ampuh untuk menumbuhkan warga negara yang berpengetahuan dan bertanggung jawab di Indonesia. Dengan mempromosikan pembelajaran aktif, pemikiran kritis, dan kesadaran sosial, pendekatan ini dapat membantu siswa menjadi lebih sadar akan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Namun, implementasi yang berhasil memerlukan perencanaan yang cermat, sumber daya yang memadai, dan dukungan berkelanjutan bagi siswa dan pendidik untuk memastikan keefektifannya.

SIMPULAN

"Merdeka Belajar" adalah suatu konsep dalam dunia pendidikan yang menekankan pada kebebasan siswa untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakatnya secara aktif dengan dukungan penuh dari guru dan lingkungan belajar. Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan, pendekatan "Merdeka Belajar" dapat menjadi alternatif pembinaan siswa untuk menjadi warganegara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Berikut adalah beberapa poin penting yang dapat diambil sebagai kesimpulan:

Meningkatkan Kesadaran Warga Negara: Dengan pendekatan "Merdeka Belajar," siswa diajak untuk lebih aktif dan kritis dalam memahami nilai-nilai, hak, dan kewajiban sebagai warga negara. Mereka diajak untuk berpartisipasi dalam diskusi, pemecahan masalah, dan berbagai aktivitas yang mendorong pemahaman lebih mendalam tentang pentingnya peran aktif dalam masyarakat. **Peningkatan Rasa Kehormatan dan Identitas Nasional:** Melalui pembelajaran yang lebih mandiri dan relevan dengan konteks sosial mereka, siswa dapat mengembangkan rasa kehormatan terhadap bangsa dan negara. Mereka juga dapat memahami identitas nasional dengan lebih baik dan menjadi warganegara yang bangga dengan budaya, sejarah, dan tradisi bangsanya.

Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis: Dalam "Merdeka Belajar," siswa diberikan kesempatan untuk mencari informasi dan mengevaluasi secara mandiri. Hal ini membantu mereka mengembangkan kemampuan berpikir kritis, sehingga mereka lebih mampu menyaring informasi, memahami isu-isu kewarganegaraan secara mendalam, dan membuat keputusan yang tepat untuk diri sendiri dan masyarakat.

Mendorong Partisipasi Sosial: Dengan merasa diberdayakan melalui pendekatan "Merdeka Belajar," siswa diharapkan akan lebih termotivasi untuk berkontribusi secara aktif dalam masyarakat. Mereka dapat terlibat dalam kegiatan sosial, kemanusiaan, dan lingkungan yang memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Menghargai Keragaman dan Toleransi: Melalui pembelajaran yang inklusif dan menghargai keragaman, siswa diajak untuk menerima perbedaan dan memahami perspektif orang lain. Ini mendorong terciptanya masyarakat yang lebih toleran dan menghormati hak asasi manusia. Pendekatan "Merdeka Belajar" dalam Pendidikan Kewarganegaraan menawarkan alternatif yang menarik dalam pembinaan siswa menjadi warganegara yang sadar hak dan kewajibannya. Dengan memberikan kebebasan belajar dan dukungan yang tepat, diharapkan siswa dapat tumbuh sebagai warganegara yang bertanggung jawab, aktif, dan peduli terhadap masyarakat dan negaranya.

DAFTAR PUSTAKA

- Assidiqi, H. (2015). Membentuk Karakter Peserta Didik Melalui Model Pembelajaran Search, Solve, Create, and Share. *Math Didactic Jurnal Pendidikan Matematika*, 1 Januari-(1), 237–242. Retrieved from <https://radarsemarang.jawapos.com/rubrik/untukmu-guruku/2020/03/11/membentuk-karakter-peserta-didik-melalui-budaya-5s/>
- Baro'ah, S. (2020). Kebijakan Merdeka Belajar Sebagai Strateg Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Tawadhu*, 4(1), 1063–1073.
- Camelia, A., & Suryandari, N. (2021). Pendidikan Multikultural: Sebuah Perspektif Global. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(6), 5143–5149. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i6.1649>
- Chotimah, U. (2012). Alternatif Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan : Sebagai Upaya Mencapai Civic Intelligence , Civic Participation Dalam Civic Responsibility. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan 2012*, 324–333.
- Dayanti, E., Maulani, I., Mukhlis, I., Rizki, M. H., Isa, H. M., & Amin, I. M. (2020). *Pembelajaran kontekstual dalam mewujudkan merdeka belajar*. 1(3), 161–164.
- Deni Sopiandiah¹, Siti Masruroh², Qiqi Yulianti Zaqiah³, M. E. (2022). Konsep dan Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4, 34–41.
- Edi Rohendi. (2018). Pendidikan Karakter di Sekolah. *E-Journal J Pendidikan Dasar Edu Humanioa*, 3(1).
- Firmansah, K. (2017). Pendidikan Karakter Melalui Pendekatan Habitiasi. *Journal Irfani*, 13, 131–138.
- Grant, M. J., & Booth, A. (2009). A typology of reviews: An analysis of 14 review types and associated methodologies. *Duke Law Journal*, 1(1), 91–108.
- Hamid, S. I., Indonesia, U. P., & Abdillah, F. (2018). Mengurai Konstelasi Filosofis Pancasila Melalui Literasi Budaya Kewarganegaraan Dan Literasi Digital Kewarganegaraan. *Prosiding Seminar Pendidikan Nasional UPI Kampus Cibiru*

2018 / ISBN 978-602-74167-6-5 / e-ISBN 978-602-74167-7-2 *MENGURAI*,
 (January). Bandung.

- Jufriadi, A., Huda, C., Aji, S. D., Pratiwi, H. Y., & Ayu, H. D. (2022). Analisis Keterampilan Abad 21 Melalui Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 7(1), 39–53.
<https://doi.org/10.24832/jpnk.v7i1.2482>
- Kurniawan, M. I. (2015). Tri Pusat Pendidikan Sebagai Sarana Pendidikan Karakter Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Pedagogia*, 4(1), 41–49.
<https://doi.org/10.21070/pedagogia.v4i1.71>
- Murdiono, M. (2017). Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Wawasan Global Warga Negara Muda. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 3(3), 349–357.
<https://doi.org/10.21831/cp.v3i3.2379>
- Raharjo, R., Armawi, A., & Soerjo, D. (2017). Penguatan Civic Literacy Dalam Pembentukan Warga Negara Yang Baik (Good Citizen) Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Warga Negara Muda (Studi Tentang Peran Pemuda HMP PPKn Demokratia pada Dusun Binaan Mutiara Ilmu di Jebres, Surakarta, Jawa Tengah. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(2), 175–198.
<https://doi.org/10.22146/jkn.26457>
- Rahmatiani, L., & Indriyani, D. (2020). Civic disposition : modal dalam era new normal. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Universitas Pamulang 2020*, 1(1), 144–152. Retrieved from Civic Disposition, Era New Normal, Culture shock
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparlan Al Hakim dkk. (2014). *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Konteks Indonesia*. Malang: Madani.
- Susanty, S. (2020). *Inovasi pembeajaran Daring Dalam Merdeka Belajar*. 9(2).
- Totok, T. (2017). Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berbasis Kearifan Lokal untuk Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III 11*, (November), 400–408. Retrieved from <http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/9932>
- Winataputra, U. S. (2014). Diskursus Aktual Tentang Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Dalam Konteks Kurikulum 2013. In *Seminar Nasional AP3KNI*. Jakarta.
- Yamin, M., & Syahrir, S. (2020). Pembangunan Pendidikan Merdeka Belajar (Telaah Metode Pembelajaran). *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(1), 126–136.
<https://doi.org/10.36312/jime.v6i1.1121>